



**WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;

11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari PONDOK PARIAN LUNANG Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari PONDOK PARIAN LUNANG Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari PONDOK PARIAN LUNANG Tahun 2020 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lunang
3. Nagari adalah Nagari Pondok Parian Lunang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pondok Parian Lunang.

Ditetapkan di Nagari Pondok Parian Lunang
Pada tanggal 8 Mei 2020



WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG,

Diundangkan di Nagari Pondok Parian Lunang
Pada tanggal 8 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG,

BENNY RIZAL

BERITA NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI PONDOK PARIAN
LUNANG
NOMOR : 2 TAHUN 2020
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No	N A M A	L / P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	YARNAWATI	P	130110500760****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PERKEBUNAN	
2.	SUADI YANTO	L	130110180785****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PERKEBUNAN	
3.	SAMSUDIN	L	130110010766****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PERKEBUNAN	
4.	INDRA HELMI	L	130101080583****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
5.	KAMARIANI	P	130110571065****	KUMBUNG GEDANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
6.	RAMADIS	L	130110100358****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
7.	AIDIL FITRA	L	130110240977****	KUMBUNG GEDANG	KARYAWAN SWASTA	
8.	JUPRIADI	L	130109250889****	KUMBUNG GEDANG	PEDAGANG	
9.	SYAHRIL	L	130110010766****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
10.	RIFA'I	L	130110061162****	KUMBUNG GEDANG	KARYAWAN SWASTA	
11.	RIDWAN	L	130110140270****	KUMBUNG GEDANG	PEDAGANG	
12.	WANDI ISMAIL	L	137103021186****	KUMBUNG GEDANG	KARYAWAN SWASTA	
13.	UMI AMAH	P	130110590545****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
14.	MALAN	L	170601010756****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
15.	AFRIZAL	L	130111010757****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
16.	HENDRI	L	130110020280****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
17.	AMRIADI	L	130110101175****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
18.	KASAR	L	130110010747****	KUMBUNG GEDANG	WIRASWASTA	
19.	JASRIL	L	130110210770****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
20.	SAFARUDDIN	L	130111010763****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
21.	JAMARIS	L	130110020487****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
22.	ZAINUL KUFRI	L	130110010760****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
23.	SISWANTO	L	130111040578****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
24.	JAMIRUS	L	130110020181****	KUMBUNG GEDANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
25.	JUNAIDI JAIS	L	130110150166****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
26.	HERMANSYAH	L	130110100556****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
27.	JHON HENDRI	L	130110090278****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
28.	HENDRA	L	130110120769****	KUMBUNG GEDANG	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
29.	HARMANSYAH	L	130111060381****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
30.	MUHAMADIL	L	130110120464****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
31.	RUSLI	L	130110010757****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	

32.	ABAS	L	130110070874****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
33.	PUDIN	L	130110010745****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
34.	HASAN BASRI	L	140113010175****	KUMBUNG GEDANG	WIRASWASTA	
35.	LUSMA	P	130110530165****	KUMBUNG GEDANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
36.	DEDI SETIA PUTRA	L	130111021191****	KUMBUNG GEDANG	KARYAWAN SWASTA	
37.	ARLINA AZWAR	P	130110520376****	KUMBUNG GEDANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
38.	ALMASRI	L	130111020786****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PERKEBUNAN	
39.	LINDA SUSANTI	P	130110520488****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
40.	SARILA	P	130110410763****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
41.	REREN YUNING PUTRI	P	130110440594****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
42.	SIROS	P	130110651256****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
43.	HERMANTONI	L	130110010781****	BUKIT TAPUS	PETANI/PERKEBUNAN	
44.	RONI PUTRA	L	130110100990****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
45.	SEBO	L	130110010757****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
46.	YANDRI	L	130110010789****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
47.	KENDRI	L	130110010783****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
48.	MARTIUS	L	130111040782****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
49.	MARDIONO	L	130110311269****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
50.	DARMAN	L	130110041287****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
51.	EFENDI	L	130110190172****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
52.	MARLINDA EPA SUSATI	L	130110120478****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
53.	HENDRI MAYUDI	L	130110010584****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
54.	SYAMSIMAR	P	130110530262****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
55.	DIRIN	L	180722121188****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
56.	SAMSUAR DITO	L	130110010773****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
57.	SUPIRMAN	L	130110010784****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
58.	AFRIANTI	P	130110440488****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
59.	SLAMAT RIYADI	L	131101210788****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
60.	BASAR	L	130110010782****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
61.	BARIN	L	130110010752****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
62.	RAMLANI	P	130110410757****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
63.	TIO CANDRA	L	130110010481****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
64.	ISHARDI AL AZHARI	L	130110171168****	BUKIT TAPUS	DAGANG	
65.	JONLAINI AFRITUS	L	130110010788****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
66.	SUDARSONO	L	130114260387****	BUKIT TAPUS	SUPIR	
67.	RUDI	L	130111060785****	BUKIT TAPUS	KARYAWAN SWASTA	
68.	AFRIA MEDIS	L	130110100390****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
69.	MARLIS	L	130110191153****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
70.	IWALDI	L	130110060479****	BUKIT TAPUS	WIRASWASTA	
71.	DARMAWATI	P	130110470264****	BUKIT TAPUS	PERDAGANGAN	
72.	JAFRIL	L	130110130169****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
73.	SYAHRIL	L	130110170374****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	

74.	KARTINI	P	130110410762****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
75.	NURBIMA	P	170612560670****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
76.	ISMARDISYAH	L	130109220383****	BUKIT TAPUS	KARYAWAN SWASTA	
77.	DEDI HENDRA GUNAWAN	L	130110050583****	BUKIT TAPUS	KARYAWAN SWASTA	
78.	MARJONI	L	130110010180****	BUKIT TAPUS	PETANI/PEKEBUN	
79.	IYUS	P	130110410757****	BUKIT TAPUS	MENGURUS RUMAH TANGGA	
80.	DOMI ZENDRA WADI	L	130111010792****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
81.	HASLINDA MAYA SARI	P	130110580584****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
82.	SYAHRIL	L	130110260752****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
83.	NASARUDIN	L	130110121174****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
84.	DAFRI SONI HAPPY	L	130111160789****	KUMBUNG GEDANG	KARYAWAN SWASTA	
85.	ZULI REFLI	L	177108141083****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
86.	SYAHMARLAN	L	130111010751****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
87.	NURHAYATI	P	130110430380****	KUMBUNG GEDANG	MENGURUS RUMAH TANGGA	
88.	RENA	P	130110410761****	KUMBUNG GEDANG	PERDAGANGAN	
89.	HILAL RAJO BUNGSU	L	130110080981****	KUMBUNG GEDANG	PETANI/PEKEBUN	
90.	JUNAIDI	L	130111061093****	BUKIT TAPUS	KARYAWAN SWASTA	

Ditetapkan di :Pondok Parian Lunang

Pada tanggal :8 Mei 2020

WALI NAGARI PONDOK PARIAN LUNANG

